

ISSN : 0126-396X

Dialog

Vol. 72, No. 2, Tahun. XXXIV, Nopember 2011

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

Pasang Surut Politik Islam

Jurnal Dialog	Nomor 072	Tahun XXXIV	Halaman 150	Jakarta Nop 2011	ISSN 0126-396X
------------------	--------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011

Terakreditasi C No:
362/AU1/P2MBI/07/2011
ISSN : 0126-396X

Pemimpin Umum:

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:

DR.H.M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

Wakil Pemimpin Redaksi:

H. Wahyudi, S.Pd.

Sekretaris Redaksi:

Hj. Astuti Nilawati, S.Pd.

Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. H.M. Athon Mudzhar, M.A.
2. Prof. Dr. H. Komarudin Hidayat, M.A.
3. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar
4. Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah

Dewan Redaksi:

1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, M.A.
2. Dr.H. Imam Tholikhah
3. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A.
4. Drs. Choirul Fuad Yusuf, SS, M.A.
5. H. Chamdi Pamudji, SH, MM.
6. Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc.

Redaktur Eksekutif:

M. Nasir, S.Th.I

Redaktur Pelaksana:

1. Abas Jauhari, MSI.
2. Umu Rahmah

Administrasi:

1. Mulyadi Azwan
2. Dra. Hj. Aini Moerad
3. Willa Widdharari, S.Kom.

Alamat Redaksi:

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama
Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380
Website: www.Balitbangdiklat.kemenag.go.id

PENGANTAR REDAKSI

PASANG SURUT POLITIK ISLAM

Relasi antara Islam dan politik di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, dan mengalami pasang surut. Politik identitas yang coba ditampilkan oleh umat Islam melalui perwakilan tokoh-tokohnya mengalami kekalahan, di antaranya ketika tujuh kata dalam piagam Jakarta dihapus. Meskipun begitu keberhasilan politik Islam pada pemilu pertama menunjukkan prestasi yang cukup baik dengan tercatat sebagai partai pemenang kedua (Masyumi) dan ketiga (NU) setelah PNI. Namun keberhasilan yang ditunjukkan umat Islam pada pemilu tahun 1955 rontok pada masa Presiden Soekarno dengan penerapan Demokrasi Terpimpinnya. Apalagi setelah tokoh-tokoh penting

Jurnal Dialog diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, intelektual dan akademisi untuk mengkomunikasikan gagasan secara ilmiah dan kreatif bagi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia

partai Masyumi dipenjarakan oleh sang presiden, keperkasaan politik umat Islam sedikit memudar.

Gerakan reformasi pasca berakhirnya orde baru telah mengubah wajah perpolitikan Indonesia, demikian pula perpolitikan umat Islam. Kondisi negara yang cenderung tidak setabil menuntut berbagai pihak merasa perlu untuk mendesakkan demokrasi, kebebasan, transparansi, akuntabilitas publik, atas persoalan-persoalan bangsa, berkaitan dengan seluruh tatanan masyarakat. Tak ayal pertentangan dan konflik sosial terus terjadi. Berbagai kepentingan, baik yang mendasari atas nama bangsa dan kelompok tertentu, juga ikut mewarnai.

Terbukanya kran kebebasan dalam berpendapat, berkumpul, dan berserikat menjadi salah satu pendorong menguatnya gerakan masyarakat sipil. Di satu sisi, gerakan ini menjadi harapan karena mampu mendorong dan menjadi stabilisator pemerintahan, namun di saat yang lain semakin mengancam. Kegetiran masyarakat atas berbagai persoalan terutama dalam hal ekonomi, politik, dan degradasi moral menjadikan masyarakat mencari alternatif baru.

Salah satunya adalah munculnya berbagai pemikiran politik Islam yang kemudian melahirkan banyak gerakan. Konsolidasi di tingkatan negara terus dilakukan, namun pada saat yang sama, terdapat konsolidasi internal di kalangan umat Islam. Eksistensi Islam politik pada masa kemerdekaan dan sampai pada pasca revolusi pernah dianggap sebagai pesaing yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Persepsi tersebut membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan

domestikasi terhadap gerak ideologis politik Islam. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktifis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau agama negara. Tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik "minoris" atau "outsider". Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideologi Negara Pancasila. Gejala menurunnya ketegangan hubungan antara Islam dan Negara mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-kebijakan tersebut berspektrum luas.

Munculnya partai-partai Islam di Indonesia telah menimbulkan perdebatan tersendiri. Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena itu dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau ada yang mengistilahkan sebagai "repolitikasi Islam". Ketika berhadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering berada pada posisi dilematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara determinan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam seringkali dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Jurnal Dialog vol. 72 XXXIV, 2011 ini mencoba menyoroti Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia. Kajian Jurnal Dialog edisi ini diawali dengan tulisan M. Firdaus

Khalimi tentang *Memahami Politik Masyarakat Muslim*. Dilanjutkan dengan tulisan Muhammad Himawan Sutanto, yang menulis tentang *Kegagalan Partai Politik Islam : Kegagalan Agenda Setting?* Sedangkan Miftahussurur menghadirkan tulisannya tentang *Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia*. Ifa Avianty dan Thobib Al-Asyhar menghadirkan tulisan tentang *Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia dari Masa Ke Masa*. Edisi ini kian menarik dengan hadirnya tulisan Herdi Sahrasad tentang *Reformasi Mesir: Berkaca pada Indonesia?* dan Ihsan Ali-Fauzi yang menghadirkan tulisan tentang *"Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi'ah*. Kajian semakin lengkap dengan hadirnya tulisan Abdul Waid tentang *Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas: Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Era Orde Lama hingga Era Orde Reformasi*.

Pada edisi ini juga dihadirkan kajian Ismatu Ropi tentang Rohis: *Dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama*, dan tulisan Nursh Shalihin Djamra tentang *Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: dari Pilihan Ideologis ke Pertimbangan Rasional*. Kajian ini diakhiri dengan telaah buku yang berjudul *Negara Islam* karangan Musdah Mulia. Buku ini secara umum mengurai dan mengulas pemikiran Haikal tentang negara Islam. Semoga kajian yang dihadirkan Jurnal Dialog edisi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam kajian politik Islam, khususnya di Indonesia. Selamat Membaca!

Redaksi

DAFTAR ISI

TOPIK

FIRDAUS KHALIMI

Memahami Politik Masyarakat Muslim — 1

MUHAMMAD HIMAWAN SUTANTO

Kegagalan Partai Politik Islam : Kegagalan Agenda Setting ? — 12

MIFTAHUSSURUR

Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia — 26

IFA AVIANTY DAN THOBIB AL-ASYHAR

Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia dari Masa Ke Masa — 44

HERDI SAHRASAD

Reformasi Mesir : Berkaca pada Indonesia? — 63

IHSAN ALI FAUZI

Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi`ah — 83

ABDUL WAID

Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas : Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Era Orde Lama Hingga Era Orde Reformasi — 97

PENELITIAN

ISMATU ROPI

Rohis: Dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama — 114

NURUS SHALIHIN DJAMRA

Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: Dari Pilihan Ideologis ke Pertimbangan Rasional — 126

BOOK REVIEW

MEILANI DEWI

Mengurai Pemikiran Haikal tentang Negara Islam — 140

REFORMASI MESIR: BERKACA PADA INDONESIA?

OLEH: HERDI SAHRASAD*

Abstrak

Nowadays, Egypt is in the hand of military that leads Egypt to the democratic life. In the same time, it was reported by media masses that one of five Egyptians lived under poverty line, and the 12% inflation reduced Egyptians income dramatically and caused impediment to get education, basic need and health. After Mubarak, Egyptian reformation is far from over. Will Egypt reformation be in common with Indonesia? How should Egypt be governed post-Mubarak? How are political, economic and social circumstances of Egypt after Mubarak? This paper explores deeply those questions.

Military Mesir kini di tangan penguasa militer yang akan mengantarkannya kepada kehidupan lebih demokratis. Pada saat yang sama, dilaporkan berbagai media bahwa satu dari lima orang Mesir hidup di bawah garis kemiskinan dan inflasi yang mencapai 12% telah memerosotkan nilai pendapatan rakyat secara drastis dan mengakibatkan tidak terjangkaunya biaya pendidikan, kebutuhan pokok, dan kesehatan. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi Mesir ke depan? Bagaimana masa depan politik dan ekonomi Mesir setelah Mubarak? Akankah reformasi Mesir seperti Indonesia? Artikel ini mencoba mengulas secara tajam berbagai pertanyaan tersebut.

Kata-kata kunci:

Revolusi sosial, transisi demokrasi, militer, kontrol sipil, muslim demokrat

*) Herdi Sahrasad, peneliti senior Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina dan Associate Director Media Institute dan Freedom Foundation, alumnus Universitas Padjadjaran ini pernah menjadi visiting fellow di CSEAS Monash University Australia (1992) dan Indiana University, USA (1989), menjadi visiting journalist di Southeast Asia Program Cornell University, AS (1994), post graduate training Lead Institute dengan Rockefeller fellowship 1994-1996, dan meraih Doktor (PhD) Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), pernah bekerja sebagai anggota redaksi Bisnis Indonesia (1986-1989) dan Media Indonesia (1989-1998), Direktur Freedom Foundation (1998-kini), juga senior editor "Indonesia News Centre/inilah.com" dan menulis di Kompas, Koran Tempo, Jakarta Post, Suara Pembaruan dan berbagai media.

Pendahuluan

Dekade terakhir, rezim otokratis Mesir sedang melemah oleh krisis ekonomi, oposisi politik, dan tekanan globalisasi. Para analis lantas bertanya-tanya ke arah mana Mesir akan pergi setelah presiden negara itu, Hosni Mubarak, tumbang?

Mesir kini di tangan penguasa militer yang akan mengantarkannya kepada kehidupan lebih demokratis. Namun bagaimana kondisi sosial-ekonomi Mesir ke depan? Akankah reformasi Mesir bernasib seperti Indonesia?

Mantan pengunjung rasa Gihan Muhammad mengatakan rakyat khawatir tentang ekonomi. Kini Mesir melangkah maju, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Perlu waktu cukup lama untuk memperbaiki kerugian ekonomi dan kerusakan sosial-politik yang dialami negara.

Demonstrasi telah usai, tetapi perlu waktu cukup lama untuk memperbaiki kerugian ekonomi di Mesir. Militer telah membubarkan parlemen dan membekukan konstitusi. Mereka akan memerintah selama enam bulan, sampai pemilu digelar.

Media melaporkan bahwa satu dari lima orang Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu, inflasi yang mencapai 12% telah memerosotkan nilai pendapatan rakyat secara drastis, di tengah makin tidak terjangkau biaya pendidikan, kebutuhan pokok, dan kesehatan. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana masa depan politik dan ekonomi Mesir setelah Mubarak? Dengan diserahkan kekuasaan transisi kepada pihak militer, tidak diragukan bahwa militer akan terus menempati kedudukan yang sentral dalam perpolitikan Mesir.

Kita melihat, sistem politik yang baru tidak akan mengubah keseluruhan fundamen sosial-ekonomi yang selama ini mendudukkan militer dalam posisi yang sangat diuntungkan. Lalu, setelah pesta kejatuhan Mubarak berlalu, akan terwujudkah mimpi-mimpi yang menghiasi benak para demonstran tentang sebuah 'Mesir Baru'? Ketika kebebasan politik tidak lagi dirasakan sebagai barang mewah kelak, akankah keadilan dan pemerataan kemakmuran dapat diwujudkan di semua lini masyarakat Mesir?

Pengalaman di Indonesia pasca-Soeharto, ternyata kehidupan rakyat tetap terpuruk, korupsi tetap menggila dan kemiskinan meluas. Sebagian kalangan, khususnya rakyat jelata, yang makin tidak tertarik untuk berdiskusi tentang demokrasi, kini bahkan dengan tanpa ragu menilai bahwa zaman Soeharto lebih enak dibandingkan 'zaman reformasi'.

Ukuran mereka sederhana sekali, mencari pekerjaan tidak susah, harga pangan dan biaya pendidikan terjangkau, dan kerukunan antarwarga masyarakat lebih terjaga. Kini rakyat Mesir bertaruh dan berlaga kembali untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Di Indonesia, kenangan menjatuhkan Soeharto mungkin masih menyisakan romantisme bagi para Aktivistis '98 yang kini mulai banyak menduduki posisi penting di legislatif maupun di pusat kekuasaan eksekutif.

Namun, bagi para aktivis yang berada di luar 'pagar kekuasaan', apalagi yang setiap hari merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat bawah secara langsung, kenangan itu mungkin menjadi sedikit pahit ketika melihat fakta tentang 'Indonesia Baru'

yang penuh warna.

Termasuk warna kebohongan yang lebih menonjol ketimbang warna kejujuran dan keadilan. Barangkali hal ini juga akan terjadi di Mesir sebagai tragedi dan sekaligus komedi politik duniawi. Dari sebuah layar televisi, kita di Indonesia melihat perkembangan baru demonstrasi besar-besaran di negeri Mesir. Setelah dikepung demonstran selama 18 hari, sang diktator Hosni Mubarak akhirnya 'lengser keprabon'. Orang nomor satu Mesir ini mundur pada Jumat, (11/2/2011) sekitar pukul 18.00 waktu Kairo.

Puluhan ribu bahkan jutaan rakyat negeri seribu menara tumpah ruah di jalanan. Mereka menyambut dengan suka cita tumbangnyanya penguasa yang sudah 30 tahun mengangkangi negeri Cleoptra. Pendek kata, mereka menyambut datangnya hari baru bernama demokrasi.

Memang proses demokratisasi cukup berat. Tak semudah membalik telapak tangan. Rakyat Mesir saja dalam waktu 18 hari melakukan demonstrasi sudah menelan 200 lebih nyawa anak manusia. Mereka menjadi martir dalam proses itu. Namun perjuangan belum selesai. Parameter demokrasi bukan hanya ditandai dengan mundurnya seorang diktator.

Demokratisasi adalah jalan atau proses perubahan dari rezim non demokratis menjadi demokratis. Secara umum demokratis mencakup beberapa proses atau tahapan rumit tetapi saling berkaitan dari liberalisasi, transisi, instalasi, dan konsolidasi.

Liberalisasi adalah proses peng-efektifan hak-hak politik yang melindungi individu dan kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang

yang dilakukan oleh negara. Sedangkan transisi bisa diartikan sebagai titik awal atau selang waktu antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. Titik itulah yang relatif rawan. Palsunya, transisi tidak mesti berakhir dengan demokrasi. Tapi bisa sebaliknya, transisi justru bisa menciptakan otoritarian baru. Hal itu biasanya ditandai dengan naiknya kembali kekuatan lama tapi menggunakan 'baju' baru.

Agar kondisi itu tidak terjadi, maka suatu keharusan dalam masa transisi tersebut, ada penghancuran terhadap sisa-sisa kekuatan lama. Memang, biasanya ada perombakan dalam sistem politik (parlemen, kepartaian, hubungan pusat dan daerah, dan lain-lain) tetapi semua itu masih menjadikan sisa-sisa kekuatan lama sebagai aktor utamanya. Jika kekuatan lama itu masih bercokol, transisi demokrasi telah mengalami pembajakan. Hal itu secara otomatis bermuara pada demokrasi mati suri. Sekali lagi, titik inilah yang harus diwaspadai.

Untuk itu, negeri Mesir tidak ada salahnya berkaca pada Indonesia. Wacana transisi demokrasi di Indonesia mulai santer bergulir pasca reformasi 1998. Perjuangan rakyat dan mahasiswa sanggup membuka ruang demokrasi dengan menjatuhkan kediktatoran Orde Baru.

Hanya saja, transisi demokrasi di Indoneisa berjalan seperti siput. Mengapa? Pertama, tidak ada penghancuran terhadap sisa-sisa kekuatan lama. Selain itu juga masih kuatnya cengkeraman militer di bidang politik. Padahal kekuatan tentara merupakan institusi yang sangat anti demokrasi. Pertanyaannya: Bisakah demokrasi Mesir tidak terkubur lagi di

padang pasir. Vox Populi Vox Dei? ¹

Penegakan hukum di Indonesia sebaiknya belajar dari Mesir yang mampu menghadirkan Husni Mubarak dalam sidang pengadilan. Meski mantan presiden Mesir itu sedang sakit. Artinya di sana tidak ada yang kebal hukum, termasuk mantan Kepala Negara seperti Mubarak. Mubarak dibawa ke pengadilan dengan kasur-kasurnya. Didakwa berlapis-lapis, membunuh 840 demonstran. Ancamannya hukuman mati atau seumur hidup. Di bidang ekonomi, pasca revolusi rakyat Mesir sudah menolak bantuan IMF. Penolakan tersebut sangat mengejutkan lantaran kaum muda revolusioner yang menggulingkan Mubarak kebanyakan lulusan dari universitas luar negeri di Eropa dan AS.

Pasca revolusi memang ada keterlibatan asing. Dua bulan lalu IMF menyodorkan pinjaman tetapi ditolak. Mereka bilang 'Kami sudah 30 tahun menjadi boneka Barat, tidak mau lagi menjadi boneka Barat'. Yang menolak adalah lulusan Amerika.²

Revolusi Mesir belajar dari kegagalan reformasi 1998 di Indonesia. Saat itu, Soeharto jatuh namun bebas dari pengadilan. Mesir belajar dari Reformasi 1998 yang dianggap gagal. Tidak ada *rule of law*, dalam hal penegakan hukum. Yang ada kontinuitas kekuasaan. Soeharto sudah mundur tetapi anak-anaknya masih ada, partainya masih ada. Mereka (Mesir) percaya, hukum

akan melampaui politik. Mesir terus belajar dari Indonesia tentang reformasi demokrasi pasca terjadinya revolusi Mesir beberapa waktu yang lalu. Mesir melihat ada kesamaan proses demokrasi di Indonesia dengan Mesir yakni antara Islam, demokrasi, modernisasi serta pembangunan.³

Indonesia memiliki kelebihan antara lain dalam menghadapi keragaman umat beragama. Mesir menggali pengalaman dari negara-negara yang memiliki pengalaman serupa, selain Indonesia dia juga belajar dari Spanyol dan Brazil, serta Afrika Selatan. Belajar dari negara lain tersebut, Mesir akan melihat mana yang lebih relevan dan tidak mengulang kesalahan yang terjadi dalam reformasi demokrasi di negara lain. Menurut Fachir, mereka juga melihat antusiasme masyarakat Indonesia tentang demokrasi. Mesir memposisikan diri dengan revolusi Mesir, sedangkan Indonesia melalui reformasi demokrasi. Perbedaan tersebut baru disadari oleh Mesir. Apakah partai politik Mesir dan rakyatnya sudah siap?

Mesir pasca Mubarak menunjukkan bahwa baik kaum nasionalis sekuler maupun golongan Islamis (Ikhwanul Muslimin) nampaknya mencoba mencari jalan tengah yang dapat menghasilkan bentuk unik Islam, liberalisme dan, mungkin, demokrasi.

Dalam prediksi akademisnya mengenai Mesir pasca Mubarak, Bruce Rutherford melihat pertarungan politik dan ideologi yang membentuk

¹ Yusuf Wibisono, "Mesir Perlu Berkaca pada Reformasi Indonesia". Beritajatim.com, Sabtu, 12 Februari 2011 diakses pukul 02:43:37 WIB.

² Pandangan Zuhaeri Misrawi, dan pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad disampaikan dalam diskusi "Pengadilan Hosni Mubarak, Pelajaran Bagi Indonesia" di Rumah Perubahan, Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2011).

³ Pandangan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Mesir, AM Fachir di sela-sela seminar dengan tema Gerakan Rakyat untuk Perubahan Perkembangan Politik Domestik Mesir, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (15/6).

Mesir akan terus berlangsung. Ia juga menelaah prospek bagi demokrasi di seluruh wilayah negeri Firaun itu dan ia berpendapat bahwa kaum sekuler dan Islamis bakal berkonvergensi sekitar agenda reformasi yang mendukung unsur-unsur kunci dari liberalisme, termasuk pengaturan atas kekuasaan negara, aturan hukum, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik. Akankah Mesir memilih demokrasi? Dan apa yang bisa Amerika Serikat/Barat lakukan untuk melihat demokrasi bersemi di negeri itu? Dalam memprediksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Rutherford menunjukkan bahwa kaum reformis Mesir enggan untuk memperluas peran publik dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa, sementara liberalisme cenderung mengarah pada kemajuan di masa depan, demokrasi mungkin sekali berjalan lambat dan tidak merata di Mesir.⁴

Tidak ada sebab yang tunggal yang menyebabkan kemungkinan demokrasi berjalan lambat di Mesir, sehingga betapa pentingnya dukungan masyarakat internasional bagi rakyat Mesir dalam melangkah ke depan pasca Mubarak. Lantas, akankah Mesir merangkul liberalisme Barat dan demokrasi? Ataukah Mesir dan negara Arab lainnya akan menganut Teokrasi Islam mirip dengan Iran pasca jatuhnya Mubarak?⁵

⁴ Bruce K. Rutherford, *Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World*, Princeton University Press, 2008.

⁵ Mengenai perdebatan dan persaingan Demokrasi Barat dan Teokrasi Iran di Timur Tengah, lihat artikel Herdi Sahrasad, "Pergolakan Timur Tengah: Teokrasi Iran vs Demokrasi Liberal Barat", opini, harian *Jawa Pos*, 16 February 2011. Herdi Sahrasad melakukan perjalanan ke Mesir, Israel, Palestina, Yordania dan Irak tahun 1990-an sebagai jurnalis

Tulisan ini mencoba meraba tegangan antara masyarakat sipil (rakyat) dan militer dalam revolusi Mesir yang akhirnya berhasil menumbangkan otokrasi Mubarak seraya mencoba menjawab pertanyaan di atas.

Setelah Presiden Hosni Mubarak jatuh, militer Mesir menghadapi tantangan serius bagaimana mereka menstransformasikan diri menjadi organisasi militer yang profesional dan efektif untuk menjaga stabilitas, dan ketertiban pemerintahan ke depan di tengah dinamika Timur Tengah yang penuh tegangan, konflik dan kekerasan. Meminjam perspektif Steven Cook, posisi militer Mesir berada dalam posisi canggung dan situasi yang sulit di tengah transisi demokrasi pasca Mubarak: *The Egyptian high command now finds itself in an awkward position... How the military—an organization devoted to stability, order, and the status quo—responds to these challenges will be decisive in shaping Egypt's future trajectory.*⁶

Sebagaimana kita ketahui, Mesir terkena efek domino dari jatuhnya Presiden Tunisia, Zine al-Abidine Ben Ali. Sebenarnya, Majalah *Foreign Policy* dalam laporannya (26/1/11) telah membahas kondisi lima negara Arab yang diperkirakan akan menghadapi gelombang protes masif pasca tumbangya rezim diktator Tunisia pimpinan Zine Al-Abidine Ben Ali. Mesir, Aljazair, Libya, dan Jordania merupakan lima negara yang dinilai sangat rentan terhadap protes rakyatnya dan terancam runtuh. Dan ternyata

harian *Media Indonesia*, menyusul pecahnya Perang Telu akibat serangan Irak ke Kuwait.

⁶ Steven A. Cook, *Egyptian Military's Moment of Truth*, dipublikasikan situs Council on Foreign Relations, diakses pada www.cfr.org, February 14, 2011, pukul.22.00.

bahwa Mesirlah yang guncang pertama akibat gejolak Tunisia. *Foreign Policy* menganalisa kondisi sosial-ekonomi dan politik menggiring Mesir menuju jurang sama yang dihadapi rezim Ben Ali di Tunisia.⁷

Kekuasaan Mubarak Terlalu Lama

Selama tiga dekade rezim Hosni Mubarak berkuasa di Mesir, dimana seluruh undang-undang terkait kondisi darurat negara ini memberikan keleluasaan kepada Mubarak untuk mengotak-atik pelaksanaan pemilu secara arbitrer.

Secara perlahan tapi pasti, rezim Mubarak terus merosot. Presiden Mesir yang berusia 82 tahun itu menghadapi berbagai masalah kesehatan. Di sisi lain, persaingan antara Gamal Mubarak, putra Presiden Mesir, dan Omar Sulaiman, Ketua Dinas Rahasia Mesir, juga semakin menguat.

Akan tetapi kondisi beberapa tahun terakhir ini sangat tidak menguntungkan bagi rezim berkuasa. Masalah keadilan sosial, pengangguran, dan kenaikan harga komoditi, lagi-lagi menjadi pemicu gelombang unjuk rasa

di Mesir. Terinspirasi dari aksi bunuh diri yang di Tunisia yang memantik revolusi, Mesir bergolak.

Sesungguhnya, ketidakpuasan dan kekecewaan sudah lama melanda rakyat Mesir, terutama pada permulaan abad 21 ini. Mesir adalah negeri berpenduduk sekitar 83 juta orang dengan lahan subur di sepanjang Sungai Nil yang menjanjikan, khususnya sepanjang aliran sungai yang sering dilanda banjir karena buruknya tata kelola air di negeri itu.

Dengan jatuhnya Mubarak, Mesir masih menyisakan sederet pertanyaan. Bagaimana prospek ekonomi Mesir ke depan? Bagaimana prospek demokrasi?

Mesir, dengan Bendungan Aswan yang dibangun pada tahun 1950-an oleh Rusia, yang memberi air untuk lahan pertanian yang luas, memiliki masa depan pertanian yang prospektif. Sampai tahun 1990-an, negara ini masih swasembada gandum dan beras, malah bahan pangan pokok diekspor untuk negara-negara Timur Tengah. Bahkan Indonesia pernah mengimpor beras dan gandum dari Mesir pada tahun 1980-an.

Mesir juga memiliki sumber daya minyak walaupun tidak sebanyak Arab Saudi atau Kuwait. Produksi tertinggi dicapai pada 1996 dengan volume 900.000 barrel per hari. Sejalan dengan naiknya harga minyak setelah tahun 1970-an, hasil minyak tersebut dipakai untuk menyubsidi harga pangan untuk rakyat yang cukup besar. Akibatnya, rakyat juga tidak terdorong untuk meningkatkan produksi pangan sehingga produksi pangan terus menurun dan sekarang Mesir sangat bergantung pada impor gandum dari Amerika dan Australia serta beras dari Thailand dan Vietnam.

⁷ Gema revolusi Tunisia yang berhasil menggulingkan rezim Zine al-Abidine Ben Ali itu, ternyata sangat mempengaruhi konstalasi politik negara-negara di kawasan Arab, termasuk Mesir. Revolusi Tunisia dipicu oleh seorang mahasiswa di Tunisia yang membakar diri dan menyulut gelombang protes yang akhirnya menjatuhkan pemerintah. Mohamed Bouazizi, mahasiswa itu, membakar diri di Kota Sidi Bouzid di Tunisia pertengahan Desember 2010 setelah polisi mencegahnya menjual sayur-sayuran tanpa izin. Dia meninggal awal Januari 2011. Tindakannya itu menjadi awal dari aksi protes kekerasan selama berminggu-minggu di segenap pelosok Tunisia terkait masalah pengangguran, korupsi dan harga makanan yang melambung. Aksi protes yang berkepanjangan ini berakhir dengan pengunduran diri dan jatuhnya Presiden Zine al-Abidine Ben Ali yang berkuasa dengan kekerasan.

Di lain pihak, produksi minyak yang mencapai puncaknya pada tahun 2006 menurun sampai 600.000 barrel per hari pada tahun lalu. Jumlah ini tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dalam negeri Mesir sehingga subsidi bahan bakar minyak pun meningkat dengan tajam. Pendapatan per kapita Mesir hampir sama dengan Indonesia, yaitu 3.000 dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Pada tahun 2010 inflasi Mesir mencapai 13,4 persen dan berakibat terhadap menurunnya kemampuan keuangan negara untuk reformasi ekonomi dan pada saat yang bersamaan, yaitu harga pangan dunia yang naik bersamaan dengan produksi minyak yang menurun dengan harga tinggi. Akibatnya, Mesir menghadapi subsidi dobel untuk pangan dan minyak yang tinggi dengan akibat lebih lanjut defisit sebesar 8 persen dari produk domestik bruto.⁸

Dewasa ini, menyusul tumbanganya Mubarak, Mesir terus menghadapi masalah pangan sebab 40 persen kebutuhan pangan diimpor, dan Kairo sangat rentan pada gejolak harga pangan dunia.

Krisis politik Mesir telah menjungkalkan perekonomian negeri itu ke jurang terdalam. Yasser Khalil, analis Timur Tengah berhujah, warga

Mesir sudah muak dengan berbagai masalah yang selalu mereka hadapi selama beberapa dasawarsa: korupsi kronis dan suap yang melumpuhkan sistem hukum dan upaya penegakannya; jurang kaya-miskin yang akut, kemiskinan yang diderita lebih 30 persen penduduknya; tingkat pengangguran 10 persen yang hampir konstan; dan sistem pendidikan yang buruk hingga yang berdampak pada tingkat buta huruf sampai 27 persen.

Di bawah kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan Mubarak, ekonomi Mesir mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bidang real estat. Akan tetapi, seperti juga di Indonesia, buah pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati golongan tertentu di Mesir, yakni orang-orang di lingkaran dalam Mubarak dan NDP (Partai Demokrasi Nasional). Kelompok-kelompok oposisi mengatakan, kartel bisnis NDP menggunakan kekuasaan mereka untuk memonopoli kemakmuran negara, sementara sebagian besar rakyat masih hidup miskin. Laporan mengungkapkan, sekitar 40 persen dari total 83 juta rakyat Mesir hidup dengan penghasilan di bawah 2 dollar AS (Rp 17.800) per hari.

Revolusi Rakyat

Sebelum revolusi rakyat yang dimulai 25 Januari, masyarakat Mesir, sebagaimana bagian integral Dunia Arab mengalami frustrasi sosial dan kesenjangan generasi (*gap generation*) yang tajam. Sekitar 40 persen kaum mudanya menganggur atau bekerja paruh waktu karena generasi tua yang terus berkuasa. Hosni Mubarak dan konco-konconya, sekedar ilustrasi,

⁸M Jusuf Kalla, Mesir: *Pangan, Minyak, Revolusi* (opini, Kompas, 4 Februari, 2011) Sepekan setelah Mubarak mundur, Mesir berencana menjual surat berharga senilai US\$1,1 miliar atau 6,5 miliar pound Mesir setelah pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak. Departemen Keuangan akan menawarkan 3 miliar pounds dari 91 hari tagihan dan 3,5 miliar pounds Mesir dengan catatan 266 hari. Pemerintah meningkatkan 3,5 miliar pound Mesir dari penjualan tagihan 182 hari pada 10 Februari, membayar hasil tertinggi dalam lebih dari dua tahun. Bursa saham pun ditutup sejak akhir perdagangan pada 27 Januari. Pembukaan bursa saham kembali ditunda hingga 16 Februari. (Bloomberg, Minggu 13/2/11).

sudah 30 tahun lebih berkuasa, yang membuat kaum muda Mesir disilusi, frustrasi dan kecewa.

Menyusul revolusi rakyat 25 Januari sampai pertengahan Februari 2011, Mesir menghadapi krisis politik berbarengan krisis ekonomi yang menelan biaya sekitar US\$30 milyar per hari. Ekonomi Mesir lumpuh akibat sikap kepala batu Mubarak yang angkuh. Mesir mengalami gejala sosial-politik yang mengakhiri kekuasaan Presiden Hosni Mubarak.

Masyarakat kawasan Timur Tengah maupun dunia internasional menyaksikan gejala sosial-politik di Mesir itu, dimana ratusan orang tewas dan sekitar 2000 orang luka-luka akibat bentrokan antara kaum demonstran dan polisi yang didukung loyalis rezim Mubarak. Meski jumlah korban tidak sebesar jumlah korban pada revolusi Iran 1979 yang mencapai satu juta jiwa, atau revolusi Prancis 1789 yang mencapai enam ratus lima puluh ribu jiwa, gejala Mesir bisa disebut sebagai proses revolusi itu sendiri. Bahkan para analis dan akademisi kemudian menyebut gejala ini sebagai "Revolusi Mesir", suatu revolusi yang relatif damai, populer dan sekuler yang menumbangkan otokrasi dan membuka peluang bagi demokrasi, dan tidak ada jaminan bahwa revolusi Mesir akan berubah untuk yang terbaik, satu-satunya hal yang pasti bahwa otokrasi telah menyebabkan kemunduran dan kemerosotan dan penjamin terbaik bagi stabilitas ke depan adalah demokrasi, seperti yang ditulis *the Economist* di bawah ini:

Revolutions do not have to be like those in France in 1789, Russia in 1917 or Iran in 1979. The protests sweeping the Middle East have more in common with the popular

*colour revolutions that changed the world map in the late 20th century: peaceful, popular and secular... There is no guarantee that Egypt's revolution will turn out for the best. The only certainty is that autocracy leads to upheaval, and the best guarantor of stability is democracy.*⁹

Terlepas dari tepat atau tidaknya istilah revolusi ini digunakan, jika dilihat dari makna generik revolusi itu sendiri, seperti yang pernah dikemukakan Theda Skocpol, seorang sosiolog Amerika, dalam bukunya "States and Social Revolution: A Comparative Analysis of France, Rusia, and China", revolusi merupakan perubahan yang cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas dalam sebuah negara. Jika makna generik ini kita tarik, maka bukan tanpa alasan gejala yang terjadi di Mesir tersebut bisa disebut sebagai sebuah proses revolusi. Apalagi, eksekusi dari revolusi itu sendiri perubahan dengan kekerasan yang melibatkan korban nyawa. Korban nyawa dalam "Revolusi Mesir" sendiri telah mencapai ratusan orang tewas dan lebih 2000 orang luka-luka. Angka itu memang jauh lebih kecil dibandingkan Revolusi Islam di Iran dimana ribuan orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Revolusi Mesir ini berhasil menyita perhatian masyarakat dunia. Bukan hanya para demonstran, banyak negara luar yang mengancam pemerintahan Hosni Mubarak, mendesaknya mundur.¹⁰

⁹ Majalah *The Economist*, edisi 3 Februari 2011.

¹⁰ Theda Skocpol, *States and Social Revolution: A Comparative Analysis of France, Russia, and China* (New York: Cambridge University Press, 1999). Theda Skocpol mendefinisikan Revolusi Sosial sebagai perubahan yang cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas sebuah negara; dan revolusi tersebut dibarengi terjadinya pemberontakan kelas dari bawah. Bagi Skocpol, Revolusi Sosial berbeda dengan Pemberontakan. Pemberontakan bisa saja

Pandangan Skocpol ini paralel dengan Tilly yang menekankan bahwa, revolusi dan kekerasan cenderung secara langsung dari pusat proses politik, dan karena itu, sebetulnya kekerasan politik adalah akibat dari persaingan perebutan kekuasaan. Bagi Tilly, revolusi adalah kasus khusus dimana kelompok-kelompok berebut kekuasaan tertinggi dan para penentang berhasil menggantikan penguasa.

Secara teoritis, demikian Tilly, beberapa penyebab situasi revolusioner adalah: Kecenderungan pengalihan sumber daya dari beberapa kelompok masyarakat kepada kelompok lain; Kedua, perkembangbiakan ideologi revolusioner dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat; ketiga, munculnya kelompok penentang revolusioner dalam memperebutkan kedaulatan. Keberhasilan tergantung besarnya kekuatan dari koalisi para kelompok penentang yang revolusioner.¹¹

berhasil dan mengikutsertakan kelas bawah, tetapi tidak menimbulkan perubahan struktural. Dibedakan juga dengan Revolusi Politik yang mengubah struktur Negara tetapi tidak struktur sosial dan tidak perlu dengan perjuangan kelas. Sedangkan perubahan lain misalnya industrialisasi, memang merubah struktur sosial masyarakat tetapi tidak melalui sebuah pergolakan politik. Dengan demikian, Skocpol tiba pada keunikan dan definisinya sendiri tentang Revolusi Sosial yang dicirikan oleh: perubahan struktur sosial maupun struktur politik secara mendasar dan berlangsung secara bersamaan dan saling memperkuat. Perubahan ini, menurut Skocpol, berlangsung melalui konflik sosial-politik yang kuat dan dalamnya perjuangan kelas memainkan peranan yang sangat penting.

¹¹Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (Reading Mass: Addison Wesley, 1978) hlm. 9. Dalam hal kejatuhan Mubarak, prediksi Prof. Fouad Ajami, pakar Timur Tengah dan akademisi di Johns Hopkins School of Advanced International Studies, bahwa Mesir tidak memiliki tradisi membunuh para firauannya (The Wall Street Journal, 31/1/11) terbukti sudah kebenarannya. Kaum revolusioner terbukti tidak membunuh Mubarak, dan lebih mendesak pentingnya pengadilan atas Mubarak dan kronikroninya.

Sumberutama gejalak Mesir berawal dari resistensi rakyat terhadap rezim Mubarak yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun. Ironisnya, Mubarak justeru menolak untuk mundur, dan dengan yakinnya melemparkan wacana bahwa kemundurannya akan mengakibatkan situasi menjadi lebih parah lagi. Sambil menyebutkan Ikhwanul Muslimin sebagai otak di balik gejalak Mesir, Mubarak menekankan bahwa kemundurannya akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang telah dikecam di Mesir selama ini. Namun rakyat Mesir tidak percaya kepada kata-kata Mubarak dan terus berdemonstrasi melakukan pergantian rezim, menumbangkan Mubarak melalui jalan revolusi rakyat, *people power*.

Mesir relatif lekat dengan pergantian rezim melalui revolusi. Mesir modern dimulai dengan pemerintahan Muhammad 'Ali (1805-1848). Inggris menduduki Mesir pada 1882. Sejak itu, Mesir kehilangan kemerdekaannya. Selanjutnya, antara 1914 - 1922 Mesir menjadi Protektorat Inggris dan baru merdeka pada tanggal 28 Pebruari 1922 dan mengambil bentuk Monarki Konstitusional di bawah Faruq. Pada tanggal 23 Juli 1952 terjadi Revolusi yang dipimpin oleh Muhammad Najib. Mesir kemudian menjadi Republik pada 18 Juni 1953 dengan Najib sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Selanjutnya Gamal Abdul Nasser menyingkirkan Najib pada 1954 dan terpilih sebagai Presiden pada 1958. Nasser meninggal pada 1970 dan digantikan oleh wakilnya Anwar al-Sadat. Namun Presiden Sadat terbunuh pada 6 Oktober 1981 dan selanjutnya digantikan oleh wakilnya Hosni Mubarak. Sejak saat itu Mubarak

memimpin Mesir sendirian. Setelah 30 tahun memerintah, di tengah desakan mundur dari jutaan warga Mesir, Mubarak menunjuk Sulaeman sebagai Wakil Presiden, namun upayanya ditolak rakyat Mesir dan gagal. Gerakan revolusi rakyat mengakhiri Mubarak dengan gegap gempita.¹²

Revolusi di Mesir berlangsung luar biasa, namun bukan revolusi Islam oleh Ikhwanul Muslimin, melainkan oleh gerakan intelektual, mahasiswa dan rakyat yang muak terhadap korupsi, kebohongan dan ketidakadilan.¹³

Gerakan yang dimotori kaum muda dan intelektual di kawasan Timur Tengah itu lahir karena KKN, ketidakadilan dan kemiskinan yang luar biasa. Kondisi ini diperparah dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam akibat kenaikan harga pangan dunia. Karena bukan revolusi ideologis yang berwatak Revolusi Islam, yang sempat menjadi kekhawatiran Barat dan banyak

orang, maka perubahan di Mesir tidak seradikal di Iran sehingga Presiden Hosni Mubarak masih bisa berkelit dan 'buying time', menunda kejatuhannya melalui transisi politik, meski korban berjatuhan.

Militer dan Kekuasaan di Mesir

Pakar militer Salim Said mencatat, tentara Mesir memasuki dan menjadi pemain politik menentukan sejak 1951 tatkala mereka menggulingkan Raja Faruk. Perwira pertama yang jadi penguasa Mesir adalah Jenderal Naguib. Namun, dalam waktu singkat Naguib dimakzulkan Gamal Abdel Nasser, kolonel yang sebenarnya memimpin penggulingan dan pengusiran Raja Faruk. Nasser bisa bertahan di kursi kepresidenan karena ia didukung dan menguasai tentara. Anwar Sadat yang kemudian menggantikan Nasser juga didukung dan menguasai tentara. Hal yang sama merupakan pengalaman Mubarak. Ketika berkuasa, langkah pertama yang Mubarak lakukan adalah menjadikan tentara sebagai penguasa (*ruler*) yang tidak memerintah (*governing*). Tentara diisi tangsi tempat mereka bermukim dengan segala fasilitas dan kemudahan dari pemerintah yang didukung.¹⁴

Untuk menjaga langgengnya kekuasaan sembari membungkam lawan-lawan politiknya, Mubarak menciptakan jaringan aparat keamanan yang terdiri dari polisi rahasia serta intelijen (*muhabarat*) yang mengawasi semua kegiatan masyarakat, terutama mereka yang dicurigai bisa menjadi ancaman bagi kekuasaan. Tentara tidak

¹² Sabar Sitanggang MS, "Demokratisasi ala Mesir: Membaca Ulang Ibnu Khaldun", diakses pada www.rimanews.com, Senin, 21 Feb 2011 06:28 WIB. Sitanggang mahasiswa PhD di program pasca sarjana Universitas Indonesia.

¹³ Steven A. Cook, pakar Timur Tengah di Council on Foreign Relations, USA dan Ketua program pasca-sarjana Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Prof Dr Zainuddin Djafar, berpendapat bahwa revolusi di Mesir, Tunisia dan lainnya bukan revolusi ideologi seperti di Iran. Cook dan Djafar menilai, Mesir merupakan contoh terbaik dari berbagai pengaruh kompleks Islam pada perkembangan sosial politik. Sejak beberapa dasawarsa, Islam merupakan bagian dari arena politik, yang dipergunakan baik oleh pemerintah maupun oposisi. Namun dalam revolusi Mesir kali ini, rakyat Mesir tidak menggemakan Revolusi Islam melainkan seruan revolusi populer dan sekuler. Mengenai pandangan Steven A Cook, bisa dibaca pada esainya "The U.S.-Egyptian Breakup" dipublikasikan situs Council on Foreign Relations, USA, diakses www.cfr.org 23/2/11 pukul.22.30. Pandangan Dr. Zainuddin Djafar, disampaikan pada Okezone, diakses www.okezone.com, 23/2/11 pukul 20.00.

¹⁴ Salim Said, "Demokratisasi Mesir Di Tangan Militer Mungkinkah?" Opini, Kompas/18/2/2011).

jadi sasaran demonstrasi karena yang dimusuhi para demonstran adalah polisi, polisi rahasia, dan *muhabarat*. Ketiganya adalah alat penindas rakyat yang digunakan Mubarak. Tentara menghindar dari kegiatan pengamanan rezim Mubarak. Inilah yang menjelaskan mengapa mereka selalu mampu tampil bersih, bahkan simpatik, di mata para pengunjung rasa yang menyerang dan "menggulingkan" Mubarak.¹⁵

Sejak revolusi rakyat di Mesir yang mulai bergerak 25 Januari sampai pertengahan Februari 2011, dunia mencermati posisi, sikap dan kebijakan militer Mesir, sampai dimana dan hendak kemana kekuatan bersenjata negeri Firaun itu mengarahkan visimisinya.

Di Mesir pada era Nasser sampai Mubarak, militer memiliki peran yang luas di berbagai perusahaan komersial, besar dan kecil, sebagaimana Steven Cook mencatat bahwa hubungan antara militer dan presiden amatlah erat, serta menguasai lebih dari 30 persen ekonomi dan hasil industri Mesir.¹⁶ Padahal, sebagaimana dicatat Kristina Mani, keterlibatan militer (Mesir) dalam ekonomi nasional membuat militer kurang akuntabel dan kurang bertanggung jawab kepada masyarakat.¹⁷

Tatkala gejala revolusi rakyat Mesir bergelora mendesak Mubarak mundur, para analis politik Timur Tengah merasa jengah melihat kelakuan militer yang seperti Sphinx itu. Berbagai pertanyaan analis pun dilontarkan: Apakah militer terlibat dalam kebr-

ualan polisi? Apakah bijaksana dalam menghadapi situasi yang bergolak? Apakah terjadi perpecahan di level atas struktur komandonya? Atau apakah hanya menanti waktu (untuk bertindak)? "Banyaknya pertanyaan berarti ada banyak hal yang bermain dalam sistem dan militer," kata seorang diplomat Barat di Kairo.¹⁸

Ketika demonstrasi terus berlangsung di Lapangan Tahrir, Kairo, terdapat analisis mengenai tiga skenario yang kemungkinan diambil militer Mesir. *Pertama*, militer mengambil alih kekuasaan langsung yang sekarang secara *de facto* sudah berada di tangan mereka.

Kedua, militer meminta Mubarak mundur untuk membuka jalan ke arah demokrasi di Mesir dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan transisi sipil, seperti yang terjadi di Tunisia saat ini.

Ketiga, militer mempertahankan rezim Mubarak dengan transaksi politik tertentu seperti Mubarak harus membuka keran demokrasi dan memenuhi tuntutan rakyat, seperti reformasi sosial dan ekonomi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Mubarak juga diminta tidak mencalonkan lagi dalam pemilu presiden di Mesir pada September tahun ini. Mubarak juga diminta tidak mewariskan kekuasaan kepada putranya, Gamal Mubarak.

Kalau kita periksa, dalam aksi revolusi Mesir, militer berhasil mengamankan tempat-tempat strategis di Mesir, dan ternyata mengambil sikap politik kedua yakni menekan agar Mubarak mundur. Kendali kekuasaan kemudian diambil alih oleh Dewan

¹⁵. *Ibid*

¹⁶ Steven Cook, *Ruling but not Governing: the Military and Political Development in Egypt, Algeria, Turkey*. (Baltimore: John Hopkins University Press, 2007).

¹⁷. Kristina Mani, "Militaries in Business," (*Armed Forces and Society* 33, no. 4, July 2007).

¹⁸ Laporan kantor berita AFP, 4/2/2011.

Tertinggi Militer. Dengan mundurnya Mubarak, perubahan di Mesir sudah tidak bisa dihindari lagi. Semua analisis yang memberi komentar di televisi Mesir sangat sepakat, reformasi politik dan ekonomi harus segera dilakukan.

Bahkan, ada yang meminta digelar pemilu baru yang bebas dan transparan di Mesir. Masyarakat internasional pun, seperti Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, mengatakan, Mesir segera melakukan reformasi politik dan ekonomi. Itulah realita baru yang dihadapi Dewan Tertinggi Militer pada transisi demokrasi saat ini.

Peran militer memang menentukan dalam kasus kejatuhan Mubarak. Keterlibatan militer sangat dominan dalam pemerintahan Mesir, dimana sejak era Nasser sampai Mubarak, 33 persen anggota kabinet berasal dari militer, sementara jabatan-jabatan sipil dan institusi penting lainnya yang dianggap strategis juga diduduki kalangan berlatar belakang militer. Pengadilan militer telah secara "keji" menjebloskan 1033 orang sipil ke penjara antara 1992 dan 2000, dimana 92 persen di antaranya dihukum mati. Sementara 12.000 sampai 15 ribu orang dijebloskan ke penjara oleh pengadilan militer pada 2004, dan militer benar-benar menjadi pelindung rezim diktator, melayani dan memproteksi elite yang berkuasa secara membabi buta. Rezim Mubarak menjadi sangat kuat, mengalahkan masyarakatnya.¹⁹

Selama berkuasa, mengira pilar-pilar penopang rezimnya masih cukup kokoh, Mubarak pun terlena dalam posisinya. Mubarak dan militer

membiarkan ketidakadilan, penyiksaan warga, pemberangusan pers, dan demokrasi abal-abal berjalan seperti biasa. Dan dalam menghadapi demonstran yang mencapai ratusan ribu orang sejak 25 Januari lalu, misalnya, militer secara *de facto* dikerahkan Mubarak mengontrol Mesir. Tank dan kendaraan lapis baja militer dalam jumlah besar bertengger di sekitar gedung-gedung strategis, seperti gedung televisi dan radio, Gedung Kementerian Luar Negeri, Museum Nasional, gedung parlemen, serta alun-alun Tahrir dan Ramses. Tank dan kendaraan lapis baja militer juga ditempatkan di tempat-tempat strategis di kota Alexandria dan Suez.

Kehadiran militer secara mencolok di jalan-jalan kota Kairo, Suez, dan Alexandria itu memenuhi permintaan Presiden Hosni Mubarak agar militer ikut turun tangan bekerja sama dengan aparat keamanan dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Peran militer itu semakin kuat setelah Presiden Mubarak mengumumkan jam malam dari pukul 18.00 hingga pukul 07.00 di seantero negeri Mesir. Sejak 25 Januari dan hari-hari selanjutnya, generasi muda Mesir, yang sebagian besar baru lahir setelah Mubarak berkuasa dan dibukakan matanya oleh teknologi telekomunikasi, memutuskan, waktunya sudah tiba bagi sang diktator untuk pergi, menyusul rekan-rekannya dari belahan dunia lain. Kaum demonstran justru mengerubuti militer dengan tank-tank dan pansernya, menghadapi pengepungan kaum reformis sipil yang sudah muak terhadap rezim militer ini.

Namun sejarah pun berulang: pengalaman Mubarak, sosok presiden tipe militer tua yang bersikap kepala batu itu, akhirnya tumbang.

¹⁹ Jason Brownlee, *Authoritarianism in the Age of Democratization*, (Cambridge University Press; first edition, July 23, 2007).

Fenomena Mubarak bagi militer Mesir menunjukkan secara telanjang, bagaimana jenderal gaek itu masuk gelanggang politik Mesir sebagai pahlawan dalam konstelasi politik global era Perang Dingin di Timur Tengah, lalu keluar dari ranah politik Mesir di era pasca Perang Dingin sebagai pecundang yang digulingkan "people power".

Yang harus digarisbawahi, militer Mesir kini bisa bercermin kembali bahwa pada masa kekuasaan otoriter Mubarak, organisasi militer benar-benar merupakan alat kekuasaan yang mati dimana Mubarak dan militer memerintah dengan tangan besi tetapi menikmati dukungan penuh negarane-negara kampiun demokrasi dan penegak HAM dari AS/Barat. Mubarak memberangus partai-partai politik dan mengurangi perwakilan independen di parlemen, dan sebaliknya memperkuat cengkeraman militer ke dalam kehidupan politik meski dilakukan secara "berpura-pura" dari belakang layar, *behind the scene*.²⁰

Di bawah Hosni Mubarak, militer Mesir mendukung pemerintahan otoriter. Namun dalam aksi revolusi Mesir di Lapangan Tahrir, militer menegaskan tidak akan menembak demonstran, suatu langkah klasik dari tipe "militer sebagai institusi". Sebaliknya, keputusan, sikap dan posisi militer yang membiarkan kaum loyalis Mubarak merangsek maju ke Lapangan Tahrir dan bersikap brutal dengan mengendarai kuda atau onta, melabrak, menembak dan melindas para demonstran hingga

ratusan pendemo tewas, merefleksikan manuver klasik "militer sebagai alat pemerintah", "militer sebagai alat kekuasaan".

Pada poin ini, demonstran Mesir melihat ada peluang bahwa militer bisa didesak kaum sipil reformis untuk mengawal dan melindungi kaum demonstran serta mengawal transisi demokrasi yang dikehendaki masyarakat sipil. Implementasi dari peran dan langkah "militer sebagai institusi" tergantung pada kemampuan Angkatan Darat Mesir dalam melakukan pemisahan diri dari rezim otoriter. Tentu saja keberhasilan reformis sipil dalam menyingkirkan rezim otoriter akan membangkitkan apresiasi dan posisi tawar kaum sipil dalam mendesak kepentingan mereka agar militer mengawal transisi demokrasi.

Adalah lebih baik bahwa kaum reformis di Lapangan Tahrir yang terdiri dari berbagai spektrum relatif luas : mahasiswa, Gerakan Pemuda 6 April, partai liberal, kelompok tradisional, Ikhwanul Muslimin yang Islamis, aktivis Facebook, kaum cendekiawan, pengacara, wartawan, pengusaha, dan kelas menengah lainnya, membangun sistem parlementer yang terdiri dari koalisi multi partai, ketimbang membiarkan Mesir kembali ke sistem presidensialisme yang mengalami personalisasi seperti Mubarak. Sistem parlementer akan mengakomodasikan banyak kekuatan pro perubahan untuk berhimpun sehingga mempersulit dikte dan kendali Amerika Serikat atau kepentingan asing lainnya untuk "mendominasi dan menghegemoni" istana presiden seperti kasus Mubarak. Bagi kaum pluralis dan nasionalis di Mesir, sistem parlementer jelas lebih kuat dan kenyal menghadapi

²⁰ Maye Kassem, "Egyptian Politics: the Dynamics of Authoritarian Rule", (Lynne Rienner Publishers, February 2004).

“dominasi dan hegemoni AS” atau “kekuatan asing lainnya” ketimbang sistem presidensialisme tunggal seperti Mubarak yang otoriter, inkompeten dan korup.²¹

Sudah tentu pasca jatuhnya Mubarak, militer Mesir tak bisa lagi mengandalkan alasan bahwa pihaknya harus dominan dan menguasai Mesir karena harus menghadapi radikalisme Islam seperti Ikhwanul Muslimin, atau gerakan Islamis radikal lainnya yang mengancam stabilitas negara. Alasan seperti itu sudah tidak rasional sebab Ikhwanul Muslimin dan Islam radikal lainnya sudah menegaskan mereka akan berpartisipasi dalam transisi demokrasi dan menghendaki pemilu yang demokratis dan kredibel untuk menyongsong Mesir masa depan. Sejauh ini, sosok yang akan memimpin Mesir pasca-Mubarak masih belum jelas dan belum juga menjadi perbincangan publik.

Ada beberapa tokoh yang muncul ke permukaan, seperti Mohamed El-Baradei, Amr Mousa, Omar Suleiman, Ayman Nour, dan Shami Hafez Ana. Namun semua sosok itu masih harus diuji dalam pemilu ke depan, siapa yang dikehendaki rakyat Mesir untuk memimpin agar negeri itu bangkit kembali secara ekonomi dan melangkah menuju demokrasi.

Militer dan Transisi Demokrasi

Para analis umumnya sependapat bahwa , menyusul jatuhnya Presiden Hosni Mubarak, peran militer Mesir akan tetap menentukan dalam perkembangan stabilitas politik dan

perubahan di Mesir ke depan. Berbagai kalangan mencoba mereka-reka bagaimana dinamika militer dalam demokrasi di Mesir ke depan pasca tumbanganya Mubarak. Sepanjang sejarah Mesir pasca kolonial, militer menjadi tulang punggung yang setia dari sebuah rezim di Mesir dan militer meraih respek dari warga Mesir karena netralitas tradisionalnya selama masa perlawanan rakyat dan peranan utamanya dalam perang Arab-Israel.

Untuk sebagian, kunci arah sikap militer Mesir ke depan untuk sebagian boleh jadi berada di tangan Washington dan bantuan militer senilai 1,3 miliar dollar AS-nya yang diberikan ke Mesir setiap tahun. Jumlah bantuan itu membuat Mesir sebagai penerima bantuan luar negeri AS terbesar kedua setelah Israel. Bantuan itu telah “membentuk suatu hubungan yang kuat” antara AS dan militer Mesir. Bahkan Barat menggambarkan bantuan militer itu sebagai “sebuah investasi yang akan terbayarkan dalam jangka panjang”.

Di tengah peta politik di negeri Cleopatra yang terpecah dalam faksi-faksi itu, kekuatan militer menjadi penentu bagi stabilitas Mesir.

Pasca jatuhnya Mubarak, untuk menempatkan militer di bawah otoritas sipil, tidaklah mudah. Sejauh ini, sebagaimana kesaksian Zuhairi Misrawi yang melawat Ke Mesir ketika revolusi berlangsung, sudah mulai muncul di kalangan oposisi agar pemerintahan transisi tidak secara serta-merta diserahkan kepada militer. Diperlukan “terobosan konstitusional” agar pemerintahan transisi merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri dari berbagai unsur. Adapun militer hanya salah satu unsur dalam pemerintahan

²¹ Alfred Stephan dan Juan J. Linz, *Does Egypt Need A Pharaoh?*, *the Jakarta Post*, 10/2/11.

kolektif tersebut.²²

Kajian Steven A Cook mencatat, militer merupakan kekuatan politik penting pelindung rezim yang berkuasa di Mesir, Aljazair dan Turki, tiga negeri kaum Muslim tersebut. Dalam kasus Mesir era Presiden Hosni Mubarak, Steven Cook menyingkapkan bagaimana rezim otoriter Mesir menyandera demokrasi, membajak politik multi partai, membajak pemilu dan mengekang kebebasan pers sebagai strategi untuk mempertahankan durabilitas sistem otoriter tersebut.²³

Ironis bahwa menyusul jatuhnya Mubarak, ternyata militer kembali berkuasa di Mesir, padahal tidak berjuang dan berdarah-darah seperti demonstran sipil yang berkorban sangat besar.

Menteri Pertahanan Mohamed Hussein Tantawi merupakan Ketua Dewan Militer Mesir yang mengambil alih pemerintahan setelah pengunduran diri sang diktator Hosni Mubarak. Dewan Tertinggi Militer Mesir, yang telah dilimpahi kekuasaan oleh pemerintah Hosni Mubarak, menyatakan tidak berencana memegang kekuasaan untuk waktu yang lama setelah mundurnya Hosni Mubarak. Kemungkinan, kekuasaan itu akan dilimpahkan ke rakyat. Benarkah?

Agaknya, menyadari bahwa gejala rakyat amat besar, Dewan Tertinggi Militer menegaskan bahwa pihaknya bukanlah sebuah alternatif pemegang kekuasaan yang dapat menyenangkan

hati rakyat Mesir. (*New Kerala*, 12/2/2011). Namun Dewan Tertinggi Militer Mesir itu mengeluarkan sejumlah pernyataan menyangkut langkah dalam mengatur Mesir dalam waktu dekat.

Mohamed Hussein Tantawi lahir pada 31 Oktober 1935 dan bergabung dengan angkatan bersenjata pada tahun 1965. Tantawi yang berpangkat jenderal besar dan telah berkiprah di pemerintahan Mesir sebagai menteri pertahanan sejak tahun 1991 ini adalah panglima angkatan bersenjata sejak 1995.²⁴

Tantawi juga menjabat dalam tiga kali perang melawan Israel, mulai tahun 1956 dalam krisis Terusan Suez dan perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan 1973.

Mengambil alih kekuasaan dari Presiden Hosni Mubarak pada Jumat lalu, Dewan Tertinggi Militer langsung membubarkan kabinet pimpinan Perdana Menteri Ahmed Shafiq, yang ditunjuk Presiden Mubarak dua pekan lalu setelah pengunduran diri kabinet pimpinan PM Ahmed Nazif pada 28 Januari. Selain pembubaran kabinet, Dewan Tertinggi Militer juga membekukan parlemen.

Mundurnya Presiden Mesir, Hosni Mubarak, menambah panjang daftar presiden Mesir yang tak pernah menyelesaikan masa waktu pemerintahannya. Susanna Kim, dalam laporannya di ABC News menyebutkan, Mubarak (dan kroninya) amat kaya, sebagian besar kekayaan Mubarak, yang totalnya saat ini 40-70 miliar dollar AS (Rp 357 triliun-Rp 625 triliun) diperoleh dari beberapa kontrak militer yang ia buat selama menjabat sebagai perwira tinggi di AU Mesir. (*ABCNews*, 2/2/11).

²² Kesaksian Zuhairi Misrawi disampaikan kepada *Metro TV*, *Kompas.com* dan *harian Kompas* pertengahan Februari 2011.

²³ Steven A Cook, *Ruling but Not Governing, the Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey* (Johns Hopkins University. Press, 2007).

²⁴ *Reuters*, 1/2/2011.

Ironisnya, kejatuhannya oleh gerakan *civil society* justru membuat Mesir modern jatuh ke tangan militer dan kembali diperintah oleh militer.

Dari berbagai literatur dan media, terungkap masuknya militer di panggung pemerintahan Mesir terjadi pada 1952, yang dikenal sebagai Revolusi 1952. Pada 22-26 Juli 1952 militer melakukan kudeta terhadap Raja Mesir, Farouk. Aksi militer ini dipicu situasi ekonomi di Mesir yang tak kunjung membaik dan kalah perang dengan Israel pada 1948. Uni Soviet dan Amerika Serikat ada di belakang aksi militer ini.

Letjen Muhammad Naguib menjadi Perdana Menteri Mesir sekaligus presiden. Salah satu bawahan Naguib adalah seorang perwira kharismatik bernama Gamal Abdul Nasser. Di masa 1950-an ini, para perwira militer mendeklarasikan Mesir sebagai negara republik, bukan lagi kerajaan. Namun dua tahun setelah menjadi wakil, Nasser bermanuver dan menjadi Perdana Menteri Mesir. Krisis politik kembali terjadi di Mesir, dan membuat Presiden sekaligus atasan Nasser, Muhammad Naguib tergeser dari pemerintahan dan menjadi tahanan rumah.

Nasser resmi menjadi Presiden Mesir. Sebagai wakilnya, ia menunjuk beberapa orang, termasuk rekan dekatnya Anwar Sadat. Pada 1970, Nasser terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Pemerintah langsung menaikkan Anwar Sadat sebagai pengganti Nasser, tanpa pemilu. Di tangan Sadat, secara perlahan, seorang perwira yang heroik bernama Hosni Mubarak, mendekat ke pusat kekuasaan Mesir. Pada 6 Oktober 1981, Anwar Sadat tewas dibunuh. Mengulang kasus Nasser, maka Hosni Mubarak langsung

naik dari jabatan wakil presiden menjadi presiden.

Dalam kasus revolusi anti-Mubarak, militer Mesir kembali berperan. Dewan Tertinggi Militer Mesir, Kamis (10/2/11) telah bertemu dan memutuskan 'melindungi negara'. Sidang Dewan Tertinggi Militer dipimpin Menteri Pertahanan Hussein Tantawi.

Sehari sebelum Mubarak mundur, militer menggelar sidang tanpa kehadiran Mubarak sebagai panglima tertinggi. Hal ini dinilai sebagai pertanda Mubarak mulai kehilangan kekuasaannya. Benar saja, Mubarak keesokan harinya mundur.

Kini pertanyaan muncul di benak rakyat Mesir, bagaimana nasib demokrasi di negara itu? Artinya, pasca-Mubarak, bukan berarti persoalan selesai, demikian pula dari sisi demokrasi.

Masa Depan Masyarakat Sipil

Pertanyaan selanjutnya: menyusul ledakan revolusi Mesir yang akhirnya menggusur Mubarak, mengapa kekuasaan jatuh ke tangan militer, bukan ke tangan *civil society*? Maukah militer Mesir menempuh demokrasi?

Nampaknya, rakyat Mesir masih menaruh kepercayaan kepada militer untuk mengendalikan dan mengonsolidasikan situasi sosial-ekonomi dan politik dalam negeri. Seperti diungkapkan Steven A Cook di atas, militer merupakan kekuatan politik penting pelindung rezim yang berkuasa dan negara di Mesir.

Militer juga ingin menarik simpati rakyat sehingga Dewan Tertinggi Militer berjanji akan mengadakan pemilu yang adil dan demokratis di Mesir. Namun, benarkah? Di sini, peran

Amerika Serikat untuk mendorong militer Mesir ke arah transisi demokrasi sangatlah krusial karena bantuan militer AS kepada Mesir amatlah besar, sebagaimana bantuan ekonominya.

Dalam hal ini, Presiden AS Barack Obama sudah mengisyaratkan pentingnya demokrasi di Mesir, dengan menyatakan bahwa terlalu banyak rakyat Mesir yang tidak yakin pemerintahnya serius dalam melakukan transisi demokrasi.

Obama menekankan, pemerintah Mesir (militer) harus mendahulukan kredibilitas dan tindakan nyata menuju demokrasi sebenarnya. Mereka bahkan belum mengambil kesempatan untuk melakukannya.

Militer Mesir menyadari bahwa perubahan iklim politik di Mesir dalam hari-hari ini berubah begitu cepat. Namun rakyat Mesir masih gamang, bagaimana pemerintahan baru mendatang bisa cepat memulihkan perekonomian dan stabilitas?

Tuntutan massa rakyat itu agar Mubarak mundur, sudah terpenuhi, namun nampaknya prospek demokrasi di Mesir belum jelas. Musim semi demokrasi di Mesir masih misteri karena militer begitu krusial dan menonjol perannya, sementara *civil society* masih fragmentatif!

Seperti halnya Indonesia, *people power* di Mesir berhasil menurunkan presiden yang telah berkuasa puluhan tahun. Di mata pemerintah AS, Indonesia pun dinilai contoh terbaik untuk transisi di Mesir. Namun tampaknya Mesir tidak mau mencontoh reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 saat rezim Soeharto tumbang.

Meski demikian, hemat penulis, untuk menunjang keberlanjutan perubahan di Mesir, ada beberapa hal krusial

yang harus ditekankan agar rakyat Mesir bisa mewujudkan peran demokratisnya ke depan, seraya mengurangi dominasi militer di Mesir. Hal-hal krusial itu adalah: Dengan jatuhnya Mubarak, transisi demokrasi di Mesir menghadapi tiga masalah sekaligus yang harus diselesaikan: *Pertama*, masalah ekonomi. *Kedua*, masalah politik dan hukum. Pemerintah transisi Mesir harus cepat mengonsolidasikan perekonomian nasional agar kebutuhan pokok dan kesejahteraan rakyat cepat dipulihkan. *Kedua*, untuk membangun pemerintahan yang kredibel dan demokratis, maka Dewan Tertinggi Militer Mesir yang berkuasa, harus mau berdialog dan bermusyawarah dengan kaum reformis dan revolusioner sipil, termasuk dengan Ikhwanul Muslimin yang dianggap radikal, dalam upaya mencapai titik temu dan kesepakatan mengenai bagaimana membangun masa depan Mesir yang lebih baik.

Barangkali, ada relevansinya pandangan Thomas Carothers, Wakil Presiden untuk Studi di Carnegie Endowment for International Peace, yang merujuk pengalaman Indonesia sebagai skenario yang lebih mungkin untuk Mesir dibanding skenario Iran. Apalagi revolusi Mesir jelas bukan "Revolusi Islam" melainkan revolusi nasional yang demokratis. Meski jalan Mesir ke arah itu mungkin masih sulit. Tetapi ada kesamaan antara Mesir dan Indonesia yakni tradisi yang relatif sekuler, militer yang kuat yang (sejauh ini) menolak untuk menindas pengunjuk rasa, dan pemberontakan yang dipimpin oleh campuran dari mahasiswa, kaum muda dan masyarakat sipil.

Bagi rakyat Mesir, sangat penting untuk mengamandemen sejumlah pasal dalam Konstitusi Mesir, yakni

Pasal 76, 77, 88, 93, dan 189, sebab pasal-pasal itu hanya mengokohkan otoriterisme. Agar proses pergantian kekuasaan berlangsung demokratis, damai, teratur dan terukur, semua pasal itu perlu diamandemen. Pasal-pasal itu harus diamandemen sebab membuka peluang bagi penguasa melakukan pengangkatan presiden seumur hidup, juga karena menetapkan 'persyaratan sangat berat' bagi munculnya kandidat oposisi untuk pencalonan presiden; juga untuk menghapus hukum darurat yang memberdayakan dinas keamanan untuk menahan tanpa adanya dakwaan kepada mereka yang dianggap mengancam negara; juga untuk mengembalikan pengawasan peradilan pemilu, termasuk keberadaan hakim di setiap TPS, dan memastikan bahwa mesin negara (seperti televisi) berada di tangan orang netral.

Amandemen konstitusi merupakan terobosan penting agar pemulihan kebebasan politik, kebebasan berserikat-berpendapat dan kebebasan pers di Mesir akan memberdayakan kekuatan politik lebih moderat untuk muncul, seperti di Indonesia, dengan militer membantu untuk memberikan stabilitas selama transisi sehingga reformasi di Mesir bisa berjalan simultan dan berkelanjutan

Dalam pergolakan Mesir dewasa ini, yang menjadi isu sensitif di Mesir, sebagaimana di negara-negara Muslim adalah kekhawatiran hadirnya kelompok-kelompok Islam radikal di pentas politik. Di Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin termasuk yang dikhawatirkan banyak orang.

Tetapi, sebagaimana diartikulasikan para analis politik, yang perlu digarisbawahi bahwa dalam kasus Mesir bisa saja terjadi seperti di

Turki dan Indonesia, dimana yang mengemuka justru fenomena Muslim demokrat di mana kekuatan politik Muslim mampu memainkan peran penting dalam demokrasi. Hal ini pun bisa terjadi di Mesir tatkala instrumen-instrumen demokrasi telah tertanam kokoh, di mana keterbukaan politik mekanisme "checks and balances" terpateri, sehingga proses deradikalisasi Islam politik, misalnya, bisa terjadi dengan sendirinya. Tentu saja, dalam konteks transisi politik di Mesir, sikap dan kebijakan yang tidak diskriminatif dalam pengelolaan politik pasca-Mubarak menjadi persyaratan yang signifikan.

Oleh sebab itu, otoritas sipil Mesir di masa sekarang dan mendatang harus bersatu, mendesakkan demokrasi yang kontekstual dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat Mesir pada umumnya.

Mengenai relasi sipil-militer di Mesir ini, meminjam perspektif Samuel Huntington, maka *civil society* Mesir harus tegas mengatakan bahwa militer harus berada dalam kontrol sipil. Huntington mengingatkan kaum sipil bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi militer. Pertama, militer harus memiliki profesional yang tinggi berdasarkan kompetensinya. Kedua, berkoordinasi dengan politisi sipil untuk merumuskan keputusan-keputusan militer maupun kebijakan internasional. Ketiga, adanya pengakuan akan kepemimpinan militer sebagai sebuah kekuatan yang mandiri dan independen. Syarat ini kemudian lazim didengar dengan militer harus menjadi kekuatan independen/netral, bukan kekuatan politik tertentu. Keempat, mengurangi intervensi politik militer kepada kekuatan sipil maupun intervensi politik kepada kekuatan militer.

Apabila mengacu kepada teori Huntington tentang konsep hubungan sipil-militer yang diistilahkan sebagai "objective civilian control" itu, maka hubungan militer dan sipil digambarkan sebagai berikut: tercapainya tingkat profesionalisme militer yang handal namun juga mengetahui batasan kemampuan profesional yang dimilikinya, tunduknya militer pada pimpinan sipil sebagai pembuat keputusan khususnya dalam kebijakan luar negeri dan militer (pertahanan), mengakui dan menerima kepemimpinan (sipil) dalam bidang kemampuan profesionalnya, namun dalam hal ini militer juga mempunyai otonomi, oleh karenanya, campur tangan militer menjadi minimal dalam politik namun juga militer tidak dicampuri oleh politik.

Untuk itu, kaum pembaharu dan reformis Mesir bisa memberi ruang yang cukup bagi militer untuk menjalankan pertimbangan-pertimbangan profesional, yang menjadi bidang mereka dalam batas-batas parameter kebijakan yang ditetapkan oleh sipil. Oleh karena itu, politisi sipil Mesir yang ingin memelihara pengakuan militer atas supremasi sipil harus melibatkan partisipasi substansi militer dalam membahas anggaran, strategi pertahanan dan pembahasan yang berkaitan dengan isu-isu militer lainnya. Namun, pelibatan pihak militer ini sama sekali tidak mengurangi kewenangan sipil untuk menentukan kebijakannya.

Para pembaharu Mesir harus waspada bahwa militer Mesir era Mubarak memiliki sifat yang represif dengan sistem komando dan hierarki yang kuat. Ke depan, rakyat Mesir harus berjuang agar Mesir menjadi negara yang demokratis, dimana militer adalah

alat negara yang profesional sesuai dengan bidangnya, namun dibatasi keterlibatannya dalam bidang politik. Rakyat Mesir harus memastikan bahwa politik militer adalah politik negara. Militer adalah lembaga yang sangat eksklusif, berorientasi pada korps dan aristokrasi yang berlandaskan kedisiplinan, kepatuhan dan ketaatan pada hierarki dan struktur komando.

Minimalisasi intervensi militer berarti mengurangi hal prerogatif militer dan membatasi misi profesionalnya yang ketat, dimana perhatian utamanya adalah pertahanan negara. Bagi para reformis Mesir, bisa jadi meminimalisasi intervensi militer dan peran tentara sering menciptakan situasi dilematis. Satu sisi, supremasi sipil mengharuskan pengurangan sejumlah kewenangan militer, sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan intervensi militer. Di sisi lain, agar tercipta stabilitas politik, maka konflik sipil-militer di Mesir harus ditekan sekecil mungkin, mengingat mengurangi hak prerogatif militer hampir selalu melahirkan konflik.

Jika kaum politisi sipil di Mesir lemah dan tidak efektif, akan mengundang intervensi militer. Sebaliknya, jika institusi politik kuat dan elite sipil di Mesir bersatu, maka akan membantu pengurangan hak-hak prerogatif militer.

Bagi kaum revolusioner dan reformis Mesir, harus disadari bahwa jika militer Mesir diberi hak politik praksis, maka yang akan terjadi adalah kekacauan, karena militer akan terbagi menjadi berbagai kelompok partisan sesuai kehendak nilai dan kepentingan dan ideologinya. Hal demikian dapat membahayakan bagi peraturan dan kesatuan bangsa Mesir sendiri, apalagi militer dibekali ketrampilan represif dan

disandangi senjata yang mematikan.

Oleh karena itu dalam era demokrasi di Mesir ke depan, sebagai sebuah negara yang berada dalam transisi demokrasi, para pemimpin, elite reformis dan masyarakat sipil di Mesir harus mampu menjamin militer tidak cenderung berkiprah dalam politik praksis yang bersifat eksekutif. Tentu saja ketegangan antara masyarakat sipil dan militer itu akan terjadi, dan berbagai guncangan dalam arus perubahan yang transisional itu hampir pasti tak terelakkan.

Dalam kaitan perubahan di Mesir ini, perspektif Alfred Stepan dalam *Rethinking Military Politics: Brazil and The Southern Cone* (1988) menarik dicermati oleh para reformis/pembaharu Mesir, bahwa menurutnya, ekspansi peran militer atau kudeta militer merupakan proses yang dikendalikan secara politik; dan untuk itu, dengan cara yang sama, upaya meraih supremasi sipil juga harus dilakukan secara politik.***